



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA ( RENJA )  
KECAMATAN BUNGURSARI  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KECAMATAN BUNGURSARI  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah kami selesaikan .

Dalam penyusunan Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bungursari adalah agar Kecamatan Bungursari memiliki dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bungursari dalam rangka menuju Visi " MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA "

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bungursari dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada satu tahun anggaran kedepan.

Purwakarta,            Aguastus 2022

CAMAT BUNGURSARI



Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021</b>	
2.1 .Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Kinerja Renstra .....	8
<b>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>19</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 OPD Kecamatan Bungursari yang telah berjalan dapat diketahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja perubahan OPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana kerja perubahan OPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu OPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Bungursari dimulai dengan menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Bungursari untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan OPD tahun lalu serta mengacu kepada Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan Perubahan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran

pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD menggunakan adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan OPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing OPD
- c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya, maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai akhir tahun 2022 serta lebih optimal kemanfaatannya bagi warga masyarakat
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022 Kecamatan Bungursari adalah :

1. UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang -Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 518 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 10 ) ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- DaerahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,dan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi , Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020, tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  11. Peraturan Daerah Povinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 , tambahan Lembaran Daerah Nomor 236):
  12. Peraturan Daerah Povinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 237):
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 61 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Bungursari tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan, dengan maksud untuk memberikan arah strategis sekaligus sebagai acuan

resmi bagi komponen pemerintah dan masyarakat sesuai dengan isi Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Purwakarta .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis sekaligus pedoman dalam menyusun Renja Perubahan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan Pemerintah dan masyarakat.

### **1.3.2. Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Bungursari tahun 2022 adalah:

- a. Sebagai pedoman /tolok ukur dan dokumen dalam menentukan perencanaan yang strategis di tingkat Kecamatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan datang
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dengan seluruh potensi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Bungursari.
- c. Untuk dijadikan dasar tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan yang dicapai.

### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bungursari**

- **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- **Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian

/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.  
(Tabel Evaluasi Triwulan II)

- **Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik

**Bab. IV Penutup.**

## BAB. II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Renstra PD.

OPD Kecamatan Bungursari telah mengevaluasi Kinerja tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2022 anggaran 2022 mempunyai 5 Program dan 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun **2022 Kecamatan Bungursari telah mengevaluasi 5 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan** yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ;
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dan realisasi renstra OPD Kecamatan Bungursari yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD berikut :

## EVALUASI KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN TAHUN 2022

## KECAMATAN BUNGURSARI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 ( S/D TRIWULAN II)					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
7	01	KECAMATAN			3.411.965.018								
7	01	01			3.341.249.818				1.232.637.539				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.318.950	27,68%	4.793.150	27,68%	4.793.150		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	6.651.400	-	-	-	-
7	01	01	2.01	02	Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun			5.829.050	-	-	-	-
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	4.838.500	99%	4.793.150	99,06%	4.793.150
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.588.210.063	15%	382.751.057	37,63%	973.968.710

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Persen	Persen	2.583.354.313	15%	380.204.057	37,60%	971.421.710
7	01	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Dokumen	Dokumen	4.855.750	52%	2.547.000	52,45%	2.547.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				336.291.833	4%	13.696.700	22,61%	76.021.150
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Item	Item	17.669.500	5%	956.200	39,06%	6.901.900
h7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang milik daerah yang disediakan			173.384.550	-	-		-
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persen	12 Bulan	27.353.900	9%	2.494.050	45,45%	12.432.550
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dan jumlah pemenuhan makanan dan minuman yang disediakan	Persen	12 Bulan	59.139.183	9%	5.371.050	50,03%	29.588.950
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Persen	Item	22.994.700	11%	2.455.400	50,87%	11.967.750
7	01	01		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan dalam daerah SKPD yang dilaksanakan	Persen	OH	35.750.000	7%	2.420.000-	43,08%	15.400.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen		357.416.972	22%	79.629.754	42,26%	151.027.929
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah merai yang dibeli /disediakan	Persen	Lembar	5.000.000	20%	1.000.000	40%	2.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, dan internet yangdibayar	Persen	Bulan	40.843.500	16%	6.539.835	26,54	10.838.464
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan pegawai non PNS	Persen	Orang	311.573.472	23%	72.089.919	44,35%	138.189.465

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen		42.012.000		4.450.000	63,85%	26.826.600
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Persen		15.800.000	12%	1.950.000	19,33%	3.054.600
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Persen	Persen	13.240.000	19%	2.500.000	81,57%	10.800.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor			12.972.000	-	-	18%	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				20.940.200	100%	20.940.000	70%	20.899.908
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan				20.940.200	100%	20.940.000	100%	20.940.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan			20.940.200	100%	20.940.000	100%	14.999.908
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				3.200.000		-	-	-
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum				3.200.000	18%	-	-	-
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan	Persen	Persen	3.200.000		-	-	-
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				42.975.000	14%	6.000.000	14%	6.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				42.975.000	14%	6.000.000	14%	6.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memntapkan pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bungursari	Persen	Persen	42.975.000	14%	6.000.000	14%	6.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				3.600.000	-	-	-	-

7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>				<b>3.600.000</b>	-	-	-	-
7	01	06	2.01	02	<b>Fasilitasi,Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi kinerja desa dan pembinaan administrasi Keuangan desa</b>			<b>3.600.000</b>	-	-	-	-

1. Faktor - faktor kegiatan dan program masih ditemukan kendala salah satunya kurang memadainya sarana prasarana kerja Kecamatan Bungursari sebagai sarana pendukung pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif
2. Target dan realisasi tidak akan sama dengan target yang telah di rencanakan (Renja)
3. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor - faktor penyebab terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta mewujudkan visi organisasi.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 untuk Kecamatan berisi Misi yaitu:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”

Dan di lengkapi dengan tujuan serta isi misi tersebut adalah :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif
- Mewujudkan Tata Pemerintahan yang bersih profesional dan berintegritas.

Untuk mendukung keduanya ,maka prioritas pembangunan dan perubahan

rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif perubahan dituangkan dalam tabel matriks berikut :

MATRIKS PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN KECAMATAN BUNGURSARI TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan								Keterangan							
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp-)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)		Prioritas Pembangunan Nasional						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
	PERENCANAAN																										
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.341.249.818															
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								17.318.950															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								B, 100 Opini Persen	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan yang di susun	2 Dokumen	Meningkatkan Kualitas Dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Daerah Yang Disusun	100%	6.651.400	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan yang di susun	2 Dokumen	Meningkatkan Kualitas Dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	6.651.400	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan modern	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	100%	5.829.050	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	100%	5.829.050						
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					B, 100 Opini Persen	Jumlah Dokumen laporan kinerja dari ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	100%	4.838.500	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah Dokumen laporan kinerja dari ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	100%	4.838.500						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan modern	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP perangkat daerah; persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	100%	2.583.354.313	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP perangkat daerah; persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	100%	2.583.354.313						
7	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					B, 100 Opini Persen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	100%	4.855.750	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP perangkat daerah; persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	100%	4.855.750						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan modern	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Item	100%	17.669.500	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Item	100%	17.669.500						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					B, Opini Persen	Jumlah barang mlk daerah yang disediakan	10 item	100%	173.384.550	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, Opini Persen	Jumlah barang mlk daerah yang disediakan	10 item	100%	173.384.550						
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					B, 100 Opini Persen	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	23 item	100%	27.353.900	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B, 100 Opini Persen	Jumlah peralatan rumah tangga	23 item	100%	27.353.900						





7	01	06	2.01	01	<b>Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Modern	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	B, 100 Opini Persen	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi kinerja desa dan pembinaan administrasi keu desa	100 %	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Desa	100%	3.600.000	Kecamatan Bugursari Kab.Purwakarta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	B, 100 Opini Persen	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi kinerja desa dan pembinaan administrasi keu desa	100 %	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Desa	100%	3.600.000
---	----	----	------	----	--	---	--	------------------------------------	---	---------------------	--	-------	--	------	-----------	------------------------------------	---	---------------------	--	-------	--	------	-----------

## **BAB. IV**

### **PENUTUP.**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bungursari tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dan di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

Dalam rangka mencapai target diharapkan mampu untuk diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kecamatan Bungursari, diikuti dengan upaya upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pencapaiannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil.

Demikian Renja perubahan Kecamatan Bungursari 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Purwakarta, Agustus 2022

CAMAT BUNGURSARI



Drs. WAWAN DARMAWAN, M.SI  
NIP.19671020 199303 1009